

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan indeks Harga Konsumen/inflasi Kabupaten Ponorogo mengikuti inflasi Kota Madiun, karena berada dalam satu kawasan wilayah perekonomian. Dimana pada Bulan Maret 2024 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Kota Madiun sebesar 3,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,12

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran yaitu :

- a. kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 8,88 persen
- b. kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,12 persen
- c. kelompok kesehatan sebesar 1,91 persen
- d. kelompok transportasi sebesar 1,28 persen
- e. kelompok pendidikan sebesar 1,45 persen
- f. kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,07 persen
- g. kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,32 persen
- h. kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,55 persen

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

permasalahan yang muncul sepanjang Triwulan I yaitu :

- a. meningkatnya harga beras seiring dengan efek musiman penurunan produksi beras yang masih dalam periode tanam
- b. ada peningkatan harga komoditas cabe, telur dan gula. Hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, mekanisme pasar di sisi lain permintaan yang meningkat
- c. terjadi kenaikan harga telur ayam ras, hal ini dipengaruhi karena harga pakan yang masih tinggi
- d. permintaan akan kebutuhan pokok yang cukup tinggi menjelang Ramadhan dan Lebaran

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan yang telah diambil meliputi :

- a. penguatan kelembagaan TPID melalui Rapat koordinasi
- b. melakukan monitoring ke pasar tradisional dan ritel moder serta mengecek gudang Bulog
- c. memberikan bantuan ACS (Angkutan Cerdas Sekolah)
- d. membuka Warung Jaga Stabilitas INflasi Pangan, Gerakan Pangan Murah (JATILAN GPM) di pasar Legi Ponorogo
- e. melakukan pemantauan harga melalui aplikasi SISKAPERBAPO
- f. mengadakan kegiatan JATILAN GPM (Jaga Stabilitas Inflasi Pangan, Gerakan Pangan Murah) keliling dengan rincian :

9 Jan 2024 Desa Pagerukir

10 Jan 2024 Desa Dadapan

16 Jan 2024 Desa Pengkol

17 Jan 2024 Desa Ngrogung

23 Jan 2024 Desa Pangkal

24 Jan 2024 Desa Ngrukem

30 Jan 2024 Desa Banjarejo

31 Jan 2024 Desa Gajah

20 Feb 2024 Desa Karangpatihan

21 Feb 2024 Desa Mrayan

27 Feb 2024 Desa Bekare

28 Feb 2024 Kelurahan Nologaten

5 Maret 2024 Desa Demangan

6 Maret 2024 Desa Ngilo ilo

6 Maret 2024 Desa Ngumpul

12 Maret 2024 Desa Ngasinan

20 Maret 2024 Desa Watubonang

20 Maret 2024 Desa Jimbe

26 Maret 2024 Desa Bareng

27 Maret 2024 Desa Krebet

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

kebijakan dan program dalam menjaga dan mengendalikan inflasi adalah :

- pemantauan harga dan kecukupan pasokan/sidak komoditas secara langsung ke sejumlah pasar, pedagang, distributor dan toko ritel
- analisa/evaluasi laporan SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok)

melaksanakan Gerakan Pangan Murah di wilayah Kecamatan di Kab Ponorogo

- rapat intern anggota TPID Kab Ponorogo
- membuka Warung Jaga Stabilitas Pangan Gerakan Pangan Murah (JATILAN GPM)

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

rumusan kebijakan pengendalian inflasi diantaranya :

1. Penguatan Kelembagaan

- meningkatkan koordinasi Anggota TPID Kab Ponorogo
- mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dengan Pemerintah Pusat yang dihadiri Anggota TPID dan Forkopimda

2. Produksi, Distribusi dan Konektivitas

- secara terus menerus memantau perkembangan harga dan kelancaran pasokan serta ketersediaan stok komoditas pokok, khususnya beras, telur, ayam dan cabe. Pemantauan dilaksanakan dengan kunjungan langsung ke pasar, gudang dan distributor atau secara offsite yaitu melalui aplikasi SISKAPERBAPO.

3. Penjajakan Kerjasama Antar Daerah

- adanya kondisi kelangkaan stok komoditas tertentu di Kab Ponorogo yang diakibatkan jenis komoditas tersebut tidak dapat dihasilkan di wilayah sendiri, membuka ruang diperlukan adanya kerjasama dengan daerah lain yang berposisi sebagai daerah penghasil. Hal tersebut akan dimulai dengan pemetaan jenis komoditas yang diperlukan dan mencari daerah penghasil jenis komoditas tersebut untuk dapat dikerjasamakan dalam pemenuhan ketersediaan stok.